



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Karangbenda No.635 Telp/Fax (0262) 7500318 Kode Pos 46393

Website: <http://padi.pangandaran.go.id> Email: bpbdpangandaran@gmail.com

Website: <http://padi.pangandaran.go.id> Email: bpbdpangandaran@gmail.com

Jalan Karangbenda No.635 Telp/Fax (0262) 7500318 Kode Pos 46393

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKP. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKP;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
- c. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKP, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif SKPD;
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKP dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKP. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

1.1. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

- Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

- dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252) sebagaimana telah mengubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi

- Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
35. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
 41. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
 42. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70);
 43. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun

2022 Nomor 48);

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran adalah untuk :

- a) Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja B Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b) Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

Adapun Tujuan disusunnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah :

- a) Agar kegiatan dilaksanakan secara terkoordinasi, teratur untuk menjadi landasan pengendalian dalam program kegiatan;
- b) Agar tercipta integrasi, sinkronisasi dan sinergi program kegiatan dalam mewujudkan visi, misi yang telah dirumuskan sesuai Renstra OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran 2021-2026;
- c) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan;
- d) Agar tercapai sumber daya secara efektif dan efisien yang berkelanjutan.

1.4 Sistematika

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020 dan capaian Renstra BPBD.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH**

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BPBD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi kinerja kegiatan merupakan pengukuran terhadap kinerja kegiatan antara indikator yang terdapat pada penetapan kinerja dan realisasinya. Penetapan kinerja yang diukur adalah Penetapan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021. Berdasarkan hasil evaluasi Pengukuran Kinerja Kegiatan maka dapat diketahui tingkat kinerja kegiatan pada masing-masing indikator yang telah ditetapkan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2021, pelaksanaan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran ditunjang dengan belanja tidak langsung yang anggarannya diperuntukkan Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib.

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran dapat dilihat rinciannya yang disajikan dalam Tabel T-C.29 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sebagai berikut :

Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra

Terlampir.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BPBD berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi. BPBD mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penanggulangan bencana yang terdiri dari fase pra bencana/fase tidak terjadi bencana, fase situasi terdapat potensi bencana, fase saat terjadi bencana/tanggap darurat bencana, fase peralihan darurat bencana dan fase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana difokuskan kepada peningkatan kapasitas masyarakat di Kabupaten Pangandaran dalam bentuk pelatihan, sosialisasi dan simulasi penanganan bencana. Pada tingkat masyarakat desa, bentuk peningkatan kapasitasnya adalah pembentukan dan pelatihan forum kesiapsiagaan dini masyarakat (FKDM) menuju desa tangguh bencana, FKDM yang telah dibentuk sampai tahun 2018 terdapat 17 lembaga, dan di tahun 2010 dibentuk 1 FKDM lagi sehingga jumlah keseluruhannya ada 18 lembaga FKDM. Sementara itu, pada tingkat/lingkungan sekolah dasar (SD) diberikan wisata edukasi bencana sebagai sarana sosialisasi bagi peserta didik dibawah umur agar mengetahui sikap dan perilaku yang harus dilakukan ketika sewaktu waktu terjadi bencana. Sekolah yang telah diberi sosialisasi (WEB GTS) sebanyak 40 Sekolah.

Penyelenggaraan penanganan bencana dilakukan pada beberapa ranah kebencanaan, untuk banjir, longsor, angin puting beliung dan lain sebagainya berhasil ditangani oleh tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Pangandaran.

Penyelenggaraan pelayanan pasca bencana difokuskan kepada verifikasi kejadian bencana dan pemberian logistik kepada korban terdampak bencana.

Untuk lebih rincinya disajikan dalam Tabel T-C.30 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran, sebagai berikut :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pangandaran

No	Indikator	SP M/ Standar dan Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian	Proyeksi					Capaian Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.	Nilai SAKIP	-	-	66,90	67,25	69,25	72,25	76,25-81,00	81,25-85,00	-	67,25-69,00	69,25-72,00	72,25-76,00	76,25-81,00	81,25-85,00	-
2.	Nilai LHE AKIP BPBD	-	-	67,03	68,13	70,25	74,15	78,65	82,30	-	68,13	70,25	74,15	78,65	82,30	-
3.	Indeks Risiko Bencana	-	-	144	143,4	142	139,2	137,84	136,44	-	143,4	142	139,2	137,84	136,44	-

4	Indeks Kapasitas Daerah	-	-	144	143,4	142	139,2	137,84	136,44		143,4	142	139,2	137,84	136,44	-
5	Indek Ketahanan Daerah			144	143,4	142	139,2	137,84	136,44		143,4	142	139,2	137,84	136,44	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan BPBD, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas, capaian terhadap visi dan misi Bupati Pangandaran, capaian program nasional dan tantangan serta peluang maka ditentukan isu strategis BPBD yaitu sebagai berikut:

1. Rendahnya Kapasitas Daerah dan Masyarakat
2. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Pangandaran masih relatif tinggi.
3. Terbatasnya anggaran pada alokasi kebutuhan penanggulangan bencana.
4. Terbatasnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
5. Terbatasnya tenaga terampil yang profesional dibidang kebencanaan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk program kegiatan telah sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal tersebut dapat diperlihatkan pada tabel 2.4 tentang review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023.

Tabel T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Terlampir.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat sesuai hasil musrenbang kecamatan pada umumnya adalah pemenuhan fasilitas dan infrastruktur publik pada ranah pencegahan dan kesiapsiagaan bencana seperti pengadaan rambu rambu evakuasi dan peralatan kebencanaan.

Usulan tersebut telah ditampung pada program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana alam. Usulan program/kegiatan dari masyarakat tersebut direkapitulasi sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang kemudian diprogramkan dalam Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan skala prioritas sebagaimana ditunjukkan pada Tabel T-C.32 berikut:

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Pangandaran

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
<i>NIHIL</i>					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

a. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024 merupakan wujud dari komitmen pemerintah dalam bidang penanggulangan bencana yang dituangkan dalam Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana merupakan pedoman bagi Kementerian atau Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian/Lembaga.

Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB) merupakan pedoman bagi daerah dalam menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah. Senada dengan hal itu, rencana nasional dalam mengurangi risiko bencana juga berkaitan dengan upaya untuk mendukung ketercapaian Visi Bupati Pangandaran “Kabupaten Pangandaran Sebagai Tujuan Wisata Berkelas Dunia” dan Misi ke-3 yaitu “Menyediakan Infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas”. Untuk merealisasikan upaya upaya tersebut, maka disusunlah strategi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang fokus pada mitigasi bencana. Tujuan BPBD adalah Meningkatkan Mitigasi bencana dalam pembangunan. Sedangkan Sasaran BPBD yaitu Meningkatnya indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dengan indikator target adalah Indeks Kapasitas Daerah.

b. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BPBD

a. Tujuan dan sasaran merupakan bagian dari tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Renstra BPBD selama lima tahun.

b. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD beserta indikator kinerja utama

c. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Penanggulangan Bencana Daerah

Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

- Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - ❖ Sub Kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
- Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - ❖ Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - ❖ Sub Kegiatan :
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - ❖ Sub Kegiatan :
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - ❖ Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - ❖ Sub Kegiatan :
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ❖ Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ❖ Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
2. Program Penanggulangan Bencana
- Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - ❖ Sub Kegiatan :
 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
 - Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - ❖ Sub Kegiatan :
 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
 - Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - ❖ Sub Kegiatan :
 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
 - Kegiatan : Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
 - ❖ Sub Kegiatan :
 - Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Untuk lebih rincinya disajikan dalam **Tabel T-C.33 : Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2021 Dan Perkiraan Maju Tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Terlampir.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBD Provinsi Jawa Barat).

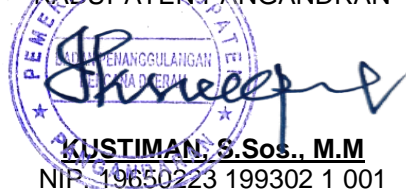
BAB V PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 Kabupaten Pangandaran disusun yang merupakan Perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman kepada RPJMD dan bersifat Indikatif selanjutnya akan terus dijabarkan kedalam pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang telah mengacu pada Visi, Misi, arah dan sasaran sehingga dapat dijadikan pedoman bagi seluruh kepentingan yang menjadi media untuk mensinergiskan arah, sasaran dan tahapan dalam melaksanakan pembangunan. Rencana Kerja ini akan selalu dievaluasi supaya diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi serta dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan Program/ Kegiatan di masa yang akan datang dan pada akhirnya dapat diketahui sejauh mana tingkat keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaannya.

Selain itu dukungan dari semua pihak terutama jajaran staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran, tantangan dan problema yang ada dalam pelaksanaan tugas di berbagai bidang (pendayagunaan sumber daya aparatur) dapat dihadapi secara bersinergi sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Parigi, 26 Juli 2022

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PANGANDRAN**



KUSTIMAN, S.Sos., M.M
NIP. 19650223 199302 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Raya Karangbenda Nomor : 635 Telp./Fax (0265) 7500155 Kode Pos
46393 Website : <https://www.bpbd.pangandarankab.go.id>
Email: bpbdkab.pangandaran@yahoo.co.id / bpbdpangandaran@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

Nomor : 050/Kpts. -BPBD/ 2022

TENTANG
PENGESAHAN RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
PANGANDARAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terarah, berkesinambungan dan bertanggungjawab maka perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahunan pemerintah daerah serta berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dipandang perlu menyusun Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Pengesahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang pembaruan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi

- Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 3);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 5);
 33. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;

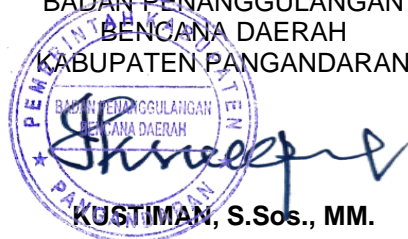
34. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabuapten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
35. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 82);
36. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022.
37. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 72 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023.
- KETIGA : Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 adalah sebagai pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 26 Juli 2022

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN



KUSTIMAN, S.Sos., MM.

Tembusan disampaikan kepada Yth, :

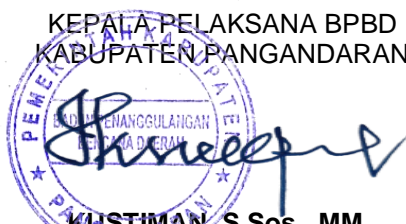
1. Bupati Pangandaran.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran.
3. Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran.
4. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 050/Kpts. - BPBD/ 2022
TANGGAL : 26 Juli 2022

**PENGESAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

- A. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran
1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- B. Sistematisa Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan sistematisa sebagai berikut :
- I. Pendahuluan
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematisa Penulisan
 - II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
 - III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - 3.3. Program dan Kegiatan
 - IV. Renja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - V. Penutup
- C. Program dan Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Pangandaran telah sesuai dengan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022.

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN PANGANDARAN



KUSTIMAN, S.Sos., MM.
NIP. 19650223 199302 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan pada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran untuk Tahun Anggaran 2023.

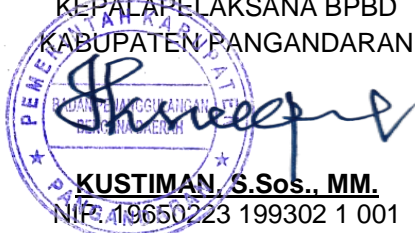
Rencana Kerja (Renja) ini merupakan langkah awal penentuan indikator kinerja yang dapat terukur secara kuantitatif maupun kualitatif sebagai gambaran tingkat pencapaian dan tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini kami berupaya semaksimal mungkin walaupun dalam prosesnya selalu mengalami hambatan serta keterbatasan, harapan kami semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat dijadikan acuan oleh semua pihak yang berkepentingan sehingga dapat dirasakan manfaatnya dalam upaya pencapaian hasil yang terbaik untuk tiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 ini, kami sadari masih jauh dari sempurna dan masih terdapat kekurangan didalamnya, untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya serta kami berharap ada masukan ataupun saran yang membangun guna perbaikan dan peningkatan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) di masa yang akan datang.

Akhirnya, besar harapan kami semoga dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 ini dapat menjadi media informasi yang berguna serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran.

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN PANGANDARAN



KUSTIMAN, S.Sos., MM.
NIP. 19650223 199302 1 001

DAFTAR ISI

Hal	
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN	i
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	6
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPBD TAHUN LALU	9
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BPBD.....	10
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BPBD.....	11
2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BPBD.....	11
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	11
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	13
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	14
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	14
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH	16
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN	17
BAB IV RENJA DAN PENDANAAN BPBD.....	19
BAB V PENUTUP	20

**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Kabupaten Pangandaran**

Anggaran Belanja Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Penambahan	hasil	catatan	penanggungjawab	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				12.428.243.797	974.200.000	13.402.443.797			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				6.453.134.174	
	Program Pemnjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	BPBD	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%	4.018.448.459					Program Pemnjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	BPBD	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%	4.063.528.459	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPBD	Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu		49.920.000				sekre	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPBD	Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu		27.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPBD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	27.000.000			op perencanaan		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPBD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	27.000.000	
	Koordinasi dan capaian penyusunan Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BPBD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dokumen	22.920.000			op pelaporan		Koordinasi dan capaian penyusunan Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BPBD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dokumen	22.920.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPBD	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100%	2.743.228.459				sekre	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPBD	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100%	2.743.228.459	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPBD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang	2.705.728.459			gaji		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPBD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang	2.705.728.459	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPBD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	27.000.000			op keuangan		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPBD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	27.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPBD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPBD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BPBD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 laporan	10.500.000					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BPBD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 laporan	10.500.000	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BPBD	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	100%	27.000.000				sekre	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BPBD	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	100%	27.000.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BPBD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	27.000.000			op aset		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BPBD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	27.000.000	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPBD	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	100%	37.920.000				sekre	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPBD	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	100%	37.920.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	BPBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	22.920.000			honor kepeg		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	BPBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	22.920.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPBD	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan							Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPBD	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan			
	Pendataan Dan Pengelolaan Administrasi Kerecewaian	BPBD	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kerecewaian	20 dokumen	15.000.000					Pendataan Dan Pengelolaan Administrasi Kerecewaian	BPBD	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kerecewaian	20 dokumen	15.000.000	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPBD	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100%	232.200.000				sekre	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPBD	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100%	232.200.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPBD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 jenis	35.000.000	35.000.000	70.000.000			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPBD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 jenis	35.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPBD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 unit	35.000.000	14.500.000	49.500.000	penambahan atk		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPBD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 unit	35.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BPBD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	35 buah	17.000.000	31.000.000	48.000.000	peralatan rumah tangga, kompor, kulkas, dispenser dll		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BPBD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	35 buah	17.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPBD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	16.500.000					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPBD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	16.500.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BPBD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	21 dokumen	18.700.000					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BPBD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	21 dokumen	18.700.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPBD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33 Laporan	110.000.000	40.000.000	150.000.000	Perjaldin luardera		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPBD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33 Laporan	110.000.000	

6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPBD	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100%	198.500.000				Sekre	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPBD	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100%	210.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPBD	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPBD	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit		
	Pengadaan Mebel	BPBD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket						Pengadaan Mebel	BPBD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPBD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	50.000.000	150.000.000	200.000.000	Penambahan pengadaan lapto dan printer dikamarkan masuknya usn2 baru		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPBD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	50.000.000	pengadaan laptop
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPBD	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	148.500.000					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPBD	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	160.000.000	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPBD	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100%	332.180.000				sekre	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPBD	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100%	375.180.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	16.500.000	8.500.000	25.000.000			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	16.500.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	167.000.000	33.000.000	200.000.000	Penambahan daya untuk penerangan jalan kantor dan pusdalop		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	210.000.000,00	tambahan Listrik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor/mamin	BPBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan	148.680.000	15.000.000	163.680.000	honor pengamman, kebersihan, supir dan penambahan mamin rapat		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor/mamin	BPBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan	148.680.000,00	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPBD	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	100%	397.500.000				sekre	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPBD	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	100%	411.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPBD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 unit	295.000.000	55.000.000	350.000.000			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPBD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 unit	305.000.000	tambahan Pajak dan Servis
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPBD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 unit	27.500.000	127.500.000	155.000.000	servis ac, Laptop dll		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPBD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 unit	31.000.000	Servis Laptop dan AC
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPBD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	75.000.000	25.000.000	100.000.000	parkiran/hordeng		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPBD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	75.000.000	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD	Persentase Penanggulangan Bencana	%	8.409.795.338					PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD	Persentase Penanggulangan Bencana	%	2.389.605.715	
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Persentase/Jumlah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		65.550.000				Pencegahan dan kesiapsiagaan	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Persentase/Jumlah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		64.000.000	
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	dokumen	-					Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	dokumen		
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	BPBD	Jumlah Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	orang	65.550.000					Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	BPBD	Jumlah Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	orang	64.000.000	Usulan Musren
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	BPBD	Persentase/Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	7.046.005.338				Pencegahan dan kesiapsiagaan	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	BPBD	Persentase/Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	965.100.338	
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	315.685.338			kerjasama dan akademisi		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	315.685.338	
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	orang	41.115.000					Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	orang	45.115.000	
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	dokumen	6.141.905.000			Banprov		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	dokumen	45.000.000	Surpras
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	BPBD	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit	7.000.000			apd		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	BPBD	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit	9.000.000	
	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	1 Dokumen	35.000.000					Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	1 Dokumen	40.000.000	
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BPBD	Jumlah Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1 Kegiatan	55.000.000			Penanaman pohon		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BPBD	Jumlah Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1 Kegiatan	55.000.000	
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	20 orang	25.000.000			pembentukan TRC gabungan eksternal		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	6 orang	30.000.000	
	Penyusunan Rencana Kontinjensi	BPBD	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen						Penyusunan Rencana Kontinjensi	BPBD	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen		
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	BPBD	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	75 orang	225.300.000	324.700.000	550.000.000	simulasi, HKB, nataruu, lebaran idop fitri, to wave		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	BPBD	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	60 Orang	225.300.000	

	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	BPBD	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	1 Dokumen	200.000.000	50.000.000	250.000.000			Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	BPBD	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	1 Dokumen	200.000.000	
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	BPBD	Persentase/Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	775.040.000				Darlog	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	BPBD	Persentase/Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	830.040.000	
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	BPBD	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	200.000.000					Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	BPBD	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	200.000.000	
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	12 dokumen	275.040.000			Honor gudang dan TRC		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	275.040.000	
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100 orang	35.000.000	65.000.000	100.000.000			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	5 orang	40.000.000	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2.300 orang	200.000.000		195.000.000			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2.300 orang	250.000.000	
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	BPBD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	65.000.000					Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	BPBD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	65.000.000	
	Respon Cepat Bencana Non Alam Pandemi/Wabah Penyakit	BPBD	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen						Respon Cepat Bencana Non Alam Pandemi/Wabah Penyakit	BPBD	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen		
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	BPBD	Persentase/Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	%	523.200.000				DARLOG	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	BPBD	Persentase/Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	%	530.465.377	
	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen						Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen		
	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 dokumen	250.000.000			Pembentukan FKDM		Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 dokumen	250.000.000	
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 dokumen						Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 dokumen		
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	BPBD	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	12 dokumen	229.200.000			Honor Pustalops		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	BPBD	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	12 dokumen	230.000.000	
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	10 Kawasan	44.000.000					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	BPBD	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Laporan	50.465.377	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pangandaran
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	05						6,201,793,213						5,759,299,051			
1	05	01					4,012,213,310					100 %	4,116,168,459			
1	05	01	2.01				48,694,000					100 %	72,840,000			
1	05	01	2.01	01			4 Dokumen	26,174,400	Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	BPBD	4 Dokumen	27,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.01	06			5 Laporan	22,519,600	Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPBD	5 Laporan	22,920,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.02					2,743,082,779						100 %	2,743,728,459	
1	05	01	2.02	01			17 Orang	2,705,728,459	Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	BPBD	17 Orang	2,705,728,459	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.02	03			12 Dokumen	26,934,320	Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	BPBD	12 Dokumen	27,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.02	07			6 Laporan	10,420,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPBD	6 Laporan	11,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.03					26,989,800						100 %	27,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pangandaran
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	26,989,800	Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	BPBD	12 Laporan	27,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	%		%	100 %	35,731,320						100 %	38,920,000	
1 05 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				22 Data	14,200,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	BPBD	22 Data	16,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	21,531,320	Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	BPBD	12 Dokumen	22,920,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	%		%	100 %	231,477,040						100 %	259,000,000	
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	34,971,029	Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	BPBD	20 Paket	40,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	34,335,754	Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	BPBD	4 Paket	40,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				25 Paket	16,999,237	Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	BPBD	25 Paket	20,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 jenis	16,489,620	Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	BPBD	3 jenis	18,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				21 Dokumen	18,686,400	Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	BPBD	21 Dokumen	20,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	109,995,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	BPBD	20 Laporan	121,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	%		%	100 %	198,441,954						100 %	210,000,000	
1 05 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	49,941,954	Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	BPBD	10 Unit	60,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pangandaran
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit 0 Unit	148,500,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	BPBD	2 Unit 0 Unit	150,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	%		%	100 %	330,819,000						100 %	344,680,000	
1 05 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	16,497,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	BPBD	12 Laporan	18,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	165,850,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	BPBD	12 Laporan	178,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	148,472,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	BPBD	12 Laporan	148,680,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	%		%	100 %	396,977,417						100 %	420,000,000	
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	294,989,220	Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	BPBD	20 Unit	310,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	27,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	BPBD	4 Unit	30,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	74,988,197	Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	BPBD	2 Unit	80,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulangan Bencana	%		%	100 %	2,189,579,903						100 %	1,643,130,592	
1 05 03 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase/Jumlah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	%		%	100 %	32,680,500						100 %	34,890,592	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pangandaran
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya				3 Kegiatan	32,680,500	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	10 Kecamatan	3 Kegiatan	34,890,592	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase/Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%		%	100 %	902,862,243						100 %	447,500,000	
1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi				1 Dokumen	315,548,700	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	10 Kecamatan	1 Dokumen	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				400 Orang 0 Orang	40,557,400	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	10 Kecamatan	400 Orang 0 Orang	45,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas				4 paket	6,920,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	10 Kecamatan	4 paket	7,500,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana				1 Dokumen	34,999,760	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	10 Kecamatan	1 Dokumen	38,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				1 kegiatan	54,890,336	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	10 Kecamatan	1 kegiatan	59,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pangandaran
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 03 2.02 08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya				20 Orang	24,999,760	Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	10 Kecamatan	20 Orang	30,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 03 2.02 10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan				4 kegiatan	225,168,157	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	10 Kecamatan	4 kegiatan	223,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 03 2.02 11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi				1 Dokumen	199,778,130	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	10 Kecamatan	1 Dokumen	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 03 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase/Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%		%	100 %	736,118,560						100 %	625,540,000	
1 05 03 2.03 01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas				1 Laporan	172,765,880	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	10 Kecamatan	1 Laporan	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 03 2.03 02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				0 Dokumen 12 dokumen	264,690,800	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	10 Kecamatan	0 Dokumen 12 dokumen	275,040,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 03 2.03 03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				50 Orang	34,299,920	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	10 Kecamatan	50 Orang	40,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 03 2.03 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				2300 Paket	199,535,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	10 Kecamatan	2300 Paket	240,500,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pangandaran
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 03 2.03 05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				2 Laporan	64,826,960	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	10 Kecamatan	2 Laporan	70,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 03 2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase/Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	%		%	100 %	517,918,600						100 %	535,200,000	
1 05 03 2.04 02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah				12 Dokumen	250,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	10 Kecamatan	12 Dokumen	260,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 03 2.04 04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan				12 Dokumen	223,918,840	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	10 Kecamatan	12 Dokumen	229,200,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 03 2.04 06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota				12 Laporan	43,999,760	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	10 Kecamatan	12 Laporan	46,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TOTAL							6,201,793,213							5,759,299,051	